

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era teknologi informasi canggih saat ini memberi akses terbuka kepada media dan media sosial untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Namun di sisi lain, banyak pihak menggunakan kecanggihan IT untuk kepentingan tertentu saja, misalnya kepentingan politik kekuasaan, utamanya melalui penyebaran berita hoaks secara bebas, yang secara psikososial bisa berakibat pada penumpukan pemikiran kritis dan keengganan memverifikasi kebenaran berita. *Hoax* berasal dari kata Bahasa Inggris yang menurut *Merriam-Webster Dictionary* (2017) berarti “sesuatu yang keliru atau bohong yang dibuat seolah-oleh benar, tindakan dan fabrikasi sesuatu yang dimaksudkan untuk menipu dan membohongi”. Sebagaimana dilansir oleh banyak analis sosial-politik dan pakar media, hoaks bermuatan kebencian terhadap pihak berbeda dalam konteks politik adu-domba kini semakin meluas, sehingga mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, dilansir oleh *merdeka.com*, guru besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan bahwa, berita adu domba yang beredar sangat berbahaya karena dapat memecah belah hubungan antar perorangan, antarkelompok, institusi, bahkan antar masyarakat dengan pemerintah (Merdeka.com, 2017). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Polisi Resort (Kapolres) Metro Bekasi Kota, Kombespol Indarto melalui

megapolindonesia.com, bahwa hoaks adalah masalah serius dan merupakan virus pemecah belah bangsa yang memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat (megapolindonesia.com, 2018).

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat dengan dengan jumlah 132,7 juta pengguna internet dari 256,2 juta warga di Indonesia, dengan prosentase 52,5% pengguna laki-laki dan 47,5% pengguna perempuan. Rentang usia pengguna internet pada usia 10-24 tahun mencapai 75,5% dan didominasi oleh mahasiswa yang menggunakan internet aktif berjumlah 7,8% dengan total 10,4 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sedangkan penetrasi penggunaan internet berdasarkan pekerjaan diketahui terdapat 89,7% oleh mahasiswa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, 2017). Dapat diketahui bahwa warga dunia maya atau yang sering disebut warganet yang terdapat di Indonesia didominasi oleh mahasiswa. Pada tahun 2014 untuk kasus yang menyangkut hoaks di dunia maya, pihak Polri menerima setidaknya 40 ribu laporan dari masyarakat tentang penyebaran berita hoaks yang tersebar di media sosial (Kompas.com, 2017). Tahun 2016, kasus lain yang menyangkut politik yaitu diberitakan Paul Francis mendukung pencalonan presiden Donald Trump melalui The WTOE 5 di website wtoe-5news.com yang berisi artikel fantasi atau candaan politik dan sindiran-sindiran. Saat ini *website* tersebut tidak dapat diakses lagi, namun pada saat itu dapat diakses melalui facebook dan dibuka sebanyak lebih dari satu juta akun yang dimana menurut survey beberapa orang percaya dalam judul tersebut (Allcott & Gentzkow, 2017). Kasus yang terjadi di Indonesia terkait hoaks lainnya adalah pada

tahun 2017 sindikat penyebar berita palsu Saracen terdiri dari tiga orang yang mengorganisir berita palsu, mengandung provokasi bernuansa SARA di media sosial tertangkap pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan jumlah 800.000 akun anggota grup di media sosial yang dikelola oleh Saracen untuk *reposting and broadcasting* kepada pengguna media sosial yang lain (bbc.com, 2017).

Selain itu, semakin maraknya berita-berita yang memicu provokasi dikalangan masyarakat terutama mahasiswa, menimbulkan aksi-aksi di lapangan yang menurunkan kualitas berpikir kritis mahasiswa dalam mencernain informasi yang tersebar, sehingga banyak mahasiswa menjadi korban hoaks di media sosial. Pada akhir dekade ini, sering muncul penyebaran berita hoaks melalui media sosial seperti *twitter*, *instagram*, *facebook* terutama terkait isu-isu politik pemerintahan yang sering dikaitkan dengan agama. Bahkan media sosial berbasis pesan singkat seperti *whatsapp*, *line* dan *telegram* dapat menjadi media penyebaran hoaks dengan pesan teks yang diteruskan melalui akun satu ke akun yang lain, atau *chat group* dari sebuah akun kemudian dibaca akun lain yang dimana *chat group* terdapat lebih dari satu akun didalamnya.

Survei yang dilakukan mahasiswa kelas etika dan hukum media Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie terhadap 300 mahasiswa-mahasiswi di 30 kampus swasta dan negeri di Jakarta secara tatap muka mendapati temuan yang dapat menjadi indikasi tentang perilaku konsumsi media generasi Z, generasi yang lahir setelah tahun 1995. Dari survei yang dilakukan pada 6-13

Juni 2017 didapati 81 persen mahasiswa-mahasiswi yang disurvei aktif menggunakan aplikasi pesan singkat, 72 persen diantaranya selalu mengecek aplikasi pesan singkatnya dan 61 persen diantaranya menerima informasi melalui aplikasi tersebut. Didapati lebih dari separuh diantaranya kadang membagi informasi yang mereka peroleh tersebut dan mayoritas mahasiswa-mahasiswi tersebut mengaku menggunakan aplikasi pesan singkat *Line*, sebagian kecil *WhatsApp* dan aplikasi lain. Hampir separuh dari jumlah mahasiswa-mahasiswi di Jakarta rupanya tidak tuntas membaca berita dan hampir 30 persen diantaranya berbagi informasi dengan alasan sebagai bagian dari pergaulan atau bahkan tidak memiliki alasan ketika membagikan informasi tersebut melalui aplikasi pesan singkat. Menariknya, sekitar 77 persen dari mahasiswa-mahasiswi yang ditemui menyadari menyebar hoaks dapat dipidana, dan 68 persen menyadari kredibilitas sumber berita sangat penting namun hanya 54 persen diantara mereka yang kadang memverifikasi sumber berita yang diterima (Tribun News, 2017). Dalam hal ini nampak sebuah perilaku mahasiswa setelah mendapati sebuah informasi yang diterima di akun media sosial miliknya. Sebagaimana dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf pada seminar bertema "Kebangsaan Hoaks dan Dunia Akademik" bersama Persatuan Kampus Swasta Jawa Timur di Surabaya, Selasa (7/2/2017) bahwa sekitar 800 ribu situs penyebar hoaks dan kebencian berseliweran di tengah-tengah kita. Mereka menyebarkan informasi hoaks dan fitnah(Okezone.com, 2017).

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tanggal 5 Mei 2018 mengadakan sebuah pertemuan bertajuk “*Trusted Media Summit*” Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widastuti yang juga hadir dalam acara tersebut memaparkan bahwa masyarakat Indonesia dalam menambah ilmu dan informasi dari buku sangat rendah, namun aktif di media sosial (detik news, 2018). Dari pertemuan itu pula, tercipta kolaborasi yang terdiri dari 22 media massa yang bekerja sama dengan Google untuk menangkal hoaks. Pola komunikasi yang tercipta di media sosial adalah produsen informasi memiliki kontribusi sebesar 10%, sedangkan penyebar informasi sebesar 90%. Dari gambaran tersebut, nampak bahwa akan berbahaya bila informasi palsu atau hoaks mendominasi pola komunikasi di media sosial.

Berdasarkan realita di atas terlihat bahwa hoaks sudah lekat dengan *gawai* dan media sosial dimana mahasiswa sebagai pengguna aktif internet menjadikannya sebagai konsumsi informasi sehari-hari. Dari sini penulis ingin mengangkat topik ini sesuai latar belakangnya sebagai mahasiswa psikologi yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Penulis berminat meneliti respon dari mahasiswa aktivis fakultas psikologi terhadap hoaks, dengan anggapan bahwa aktivis lebih responsif dalam merespon isu-isu hangat melalui cara berpikir kritis dan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya yang menjadi ciri khas psikologi dibandingkan dengan mahasiswa pada umumnya. Dengan latar belakang pendidikan di perguruan tinggi, mengasah kemampuan berpikir kritis yang dimiliki aktivis diharapkan

bisa menunjukkan sikap selektifnya dalam penelitian ini. Disampaikan bahwa, kecerdasan dalam menggunakan media sosial hanya bisa dibangun melalui perilaku berpikir kritis dengan cara pendidikan yang lebih untuk memilih berita dan konten informasi yang akurat, meningkatkan kemampuan kesadaran bahwa media dibangun untuk kepentingan politik dan ekonomi, maka dengan pembenahan pendidikan untuk mengatasi hoaks di media sosial yang semakin tak terkendali (Koran Jakarta, 2018).

Secara khusus, peneliti ingin mengetahui secara mendalam melalui organisasi tingkat nasional yaitu ILMPI (Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia) yang berada di beberapa universitas di Solo Raya. ILMPI sebagai wadah aspirasi mahasiswa psikologi di tiap wilayah, diasumsikan berfungsi memfasilitasi perluasan pemikiran dan proses berpikir kritis karena ILMPI terdiri dari aktivis yang didelegasikan oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang berasal dari Jurusan Psikologi di perguruan tinggi di tiap wilayah, sedangkan BEM sering dikenal masyarakat atas aksi kritisnya. Dibandingkan dengan mahasiswa non-aktivis, mahasiswa pada umumnya yang bukan aktivis dianggap cenderung hanya menjadi pengguna aktif media sosial. Mahasiswa non-aktivis diasumsikan cenderung menerima informasi dari akun-akun anonim maupun portal berita yang muncul di media sosial tanpa melakukan proses berpikir kritis yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa aktivis. Penelitian ini mencoba membandingkan respon berpikir kritis terhadap hoaks antara mahasiswa aktivis dan non-aktivis, untuk

melihat pengaruh aktivisme terhadap bagaimana mahasiswa Psikologi di Solo Raya mensikapi hoaks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana sikap mahasiswa aktivis dan non-aktivis psikologi tingkat universitas di Solo Raya terhadap berita hoaks yang tersebar di media sosial. Peneliti terdorong mencari tahu apakah sikap mahasiswa aktivis lebih kritis dibanding mahasiswa non-aktivis terhadap hoaks?

C. Tujuan

1. Mengetahui sikap terhadap penyebaran berita hoaks pada mahasiswa aktivis Psikologi ILMPI di Solo Raya saat terpapar berita-berita hoaks politik.
2. Mengetahui sikap mahasiswa non-aktivis di Solo Raya terhadap penyebaran berita hoaks.
3. Memahami perbedaan dan persamaan sikap antara mahasiswa aktivis dan non-aktivis, berikut penjelasan ilmiah atas sikap kedua kelompok ini.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Komunikasi, Psikologi Perdamaian, dan Psikologi Siber pada kajian mengenai sikap

mahasiswa aktivis dan non-aktivis terhadap hoaks universitas di Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan sarana untuk proses pembelajaran bagi pendidik dan pemangku kepentingan yang relevan sekaligus sebagai rekomendasi bagi peneliti berikutnya serta pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita hoaks di lingkungan kampus.